

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR : 31 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

A photograph of a person paragliding over a blue tarp-covered slope. The person is wearing a black jacket and a blue helmet. The background shows a clear blue sky and a distant landscape. A large red arrow graphic points upwards from the bottom left towards the top right, partially overlapping the photograph.

RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
(RENJA) TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Wonogiri mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. RENJA-PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD);
2. RENJA-PD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN;
3. RENJA-PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan guna mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan.

Mengingat arti strategis dokumen RENJA-PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA-PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja-PD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Sejalan dengan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wonogiri yaitu *“Mewujudkan Wonogiri Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera dengan semangat Go Nyawiji Sesarengan Mbangun Wonogiri”*, maka Sasaran DPMPTSP Kabupaten Wonogiri yaitu *“Terwujudnya Iklim Investasi yang Sehat”* diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan OPD yaitu *“Meningkatkan Nilai Investasi”* yang menjadi tugas dan tanggungjawab DPMPTSP Kabupaten Wonogiri pada Tahun 2023.

Untuk dapat mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan tujuan OPD tersebut, DPMPTSP Kabupaten Wonogiri menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023. Penyusunan Renja-PD Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ke-3 (tiga) dari RPJMD 2021-2026. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD). Sedangkan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah akan menjadi acuan dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran

Sementara (KUA PPAS), dan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum DPMPTSP Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 98);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 175);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 187);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 196);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk memberikan pedoman, gambaran, dan arah pembangunan Penanaman Modal Kabupaten Wonogiri dalam jangka pendek (satu tahun) yaitu untuk tahun 2023. Sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2022, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPMPTSP tahun 2023.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja DPMPTSP tahun 2023 adalah :

1. Menetapkan sasaran yang akan dicapai oleh DPMPTSP tahun 2023;
2. Menyiapkan rencana Program DPMPTSP tahun 2023;
3. Menyiapkan rencana Kegiatan DPMPTSP tahun 2023;
4. Menyusun indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan di capai, guna mencapai sasaran organisasi tahun 2023;
5. Menetapkan pendanaan indikatif untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan DPMPTSP tahun 2023.

D. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

- B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- B. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- C. Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RPJMD dan RKPD, bahwa penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Penyusunan Renja harus berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Renja Perangkat Daerah harus berpedoman pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, guna memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan atau kegiatan baru yang disusun dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra perangkat daerah. Indikator kinerja DPMPTSP selama lima tahun mengacu pada tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang telah ditentukan dalam Renstra DPMPTSP Tahun 2016-2021. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah s/d tahun 2022 sesuai RPJMD Kabupaten Wonogiri tahun 2016-2021 dapat dilihat dalam tabel 2.1.a dan sesuai RPJMD Kabupaten Wonogiri tahun 2021-2026 dapat dilihat dalam tabel 2.1.b.

Tabel 2.1.a
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020
Kabupaten Wonogiri

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2021			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Ting kat Cap aian Real isasi Targ et Rens tra (%)
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							(7/6)		(5+7+9)	(10/4)
	UNSUR PENANAMAN MODAL									
	PROGRAM									
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase peningkatan jumlah investor	8,15%	24,02%	-	-	-	-	-	-
	KEGIATAN									

	Fasilitasi Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan UKM	Kepeminatan kerjasama Investasi antara Pengusah Besar dan UKM	5	0	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Kabupaten Wonogiri	Dokumen rekomendasi kebijakan Penanaman Modal	2	0	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Wonogiri Bussines Forum	Pelaksanaan Pelayanan langsung kepada pelaku usaha di daerah (jemput bola)	250	893						
	Promosi Potensi Investasi	Jumlah event yang diikuti	2	0	-	-	-	-	-	-
	PROGRAM									
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase peningkatan jumlah nilai investasi	0,83%	0,87%	-	-	-	-	-	-
	KEGIATAN									
	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang dipantau, dibina dan diawasi pelaksanaan Penanaman Modal	200	94	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Pengolahan Data SKM	Jumlah dokumen laporan SKM	4	3	-	-	-	-	-	-

	Peningkatan Pelayanan Investasi	Jumlah data investasi	3	3	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Penilaian PTSP	Terwujudnya peningkatan kinerja pelayanan terpadu satu pintu tingkat nasional	1	0	-	-	-	-	-	-
	PROGRAM									
	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	95%	100%	-	-	-	-	-	-
	KEGIATAN									
	Operasional Pelayanan Perizinan	Jumlah izin yang diterbitkan	1000	1606	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan Pelayanan Berbasis ISO	Pelayanan berstandar ISO (update sertifikat ISO)	1	1	-	-	-	-	-	-
	PROGRAM									
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tercapainya kinerja Administrasi Perkantoran	100%	100%	-	-	-	-	-	-
	KEGIATAN									
	Penyediaan surat Menyurat	Jumlah Meterai dan benda pos yang dibeli	350	241	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah bulan terbayarnya jasa Komunikasi, Air dan Listrik	12	12	-	-	-	-	-	-

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	11	10	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jenis alat kebersihan kantor yang disediakan	25	25						
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis kebutuhan alat tulis kantor yang dibeli	87	87	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	6	6	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman kantor dan tamu pemohon	12	12	-	-	-	-	-	-
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan Dinas ke luar daerah	24	24	-	-	-	-	-	-
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas dalam daerah	12	3	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	Jumlah bulan pembayaran honorarium tenaga kerja Non PNS (4 orang)	12	12						
	PROGRAM									
	Program Peningkatan	Persentase kenaikan nilai aset	2%	2%	-	-	-	-	-	-

	Sarana/Prasana Aparatur	peralatan dan mesin tahun ini terhadap nilai aset peralatan dan mesin tahun lalu								
	KEGIATAN									
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2 yang dipelihara (11 unit)	11	10	-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Bangunan gedung yang dipelihara	2	2	-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara (15 komputer PC/Laptop, Laptop 12 unit AC, 4 dispenser, 4 unit TV, 1 kulkas)	12	12	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Mebelair	Jumlah Mebelair yang dibeli (2 buah meja rapat dan 1 stel meja tamu)	1	0						
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang dibeli (1 unit PC, 2 buah Laptop dan 2 buah printer)	1	1						
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas Roda 2 yang dibeli	1	0						

	PROGRAM									
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Jumlah laporan dan dokumen terhadap jumlah laporan dan dokumen yang harus dibuat	100%	100%	-	-	-	-	-	-
	KEGIATAN									
	Peningkatan Kinerja Perencanaan, Pelaporan dan Monitoring Evaluasi	Jumlah dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja yang disusun	4	4	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Kinerja Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	14	14	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.1.b
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022
Kabupaten Wonogiri

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2021			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							(7/6)		(5+7+9)	(10/4)
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM									
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100%	-	100%	100%	100	100%	33%	33%
	KEGIATAN									

	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100%	-	100%	100%	100	100%	45%	45%
	KEGIATAN									
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang di susun	100%	-	100%	100%	100	100%	27%	27%
	KEGIATAN									
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	100%	-	100%	100%	100	100%	0%	0%
	KEGIATAN									
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian	100%	-	100%	100%	100	100%	40%	40%
	KEGIATAN									
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah	100%	-	100%	100%	100	100%	38%	38%
	KEGIATAN									
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	-	100%	100%	100	100%	53%	53%
	KEGIATAN									
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	-	100%	100%	100	100%	31%	31%

	URUSAN PENANAMAN MODAL									
	PROGRAM									
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah kebijakan daerah tentang penanaman modal	5	-	1	1	100	0	0	0%
	KEGIATAN									
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kebijakan daerah tentang penanaman modal	3	-	1	1	100	0	0	0%
	KEGIATAN									
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah potensi dan peluang penanaman modal	2	-	0	0	0	0	0	0%
	PROGRAM									
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor skala mikro dan kecil	5100	-	600	1511	252	700	17110	335%
	KEGIATAN									
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah investor skala mikro dan kecil terfasilitasi NIB (Nomer Induk Berusaha)	5100	-	600	1511	252	700	17110	335%
	PROGRAM									
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Presentase Realisasi perizinan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur)	95%	-	80%	90%	112,5	85%	100%	105%

	KEGIATAN									
	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah permohonan izin yang ditindaklanjuti sesuai SOP (Standar Operasioanl Prosedur)	6743	-	1025	1739	170	1076	388	6%
	PROGRAM									
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah investor yang merealisasikan penanaman modalnya	6575	-	1025	1739	170	1050	17110	260%
	KEGIATAN									
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah investor yang tertib LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	660	-	110	111	101	110	52	8%
	PROGRAM									
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Presentase data penanaman modal yang di update	100%	-	100%	100%	100	100%	100%	100%
	KEGIATAN									
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis data penanaman modal yang diupdate (jumlah investor, nilai investasi, dan penyerapan tenaga kerja)	3	-	3	3	100	3	3	100%

B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja organisasi diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Capaian kinerja pelayanan DPMPTSP Kabupaten Wonogiri tahun 2022, realisasi Indikator Kinerja dan Perkiraan Capaian Tahun 2022 serta Proyeksi Tahun 2023, secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
DPMPTSP Kabupaten Wonogiri

Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	SPM/Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
							2021	2022	2003	2024	2021	2022	2023	2024	
1.	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Meningkatkan nilai Investasi	Kenaikan Nilai Investasi			-	-	29,97	50,94	50	33,33	93,96	-	50	33,33	
			Terwujudnya iklim investasi yang sehat	Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)	-	-	1000	2000	3000	4000	7.379	-	3000	4000	
				Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional PMDN/PMA (dalam Milyar Rupiah)	-	-	265	400	600	800	517,731	-	600	800	

				Rasio Daya Serap tenaga kerja	-	-	2	2	2	2	2,6	-	2	2
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan DPMPTSP yang baik	Nilai kematangan organisasi DPMPTSP			-	-	46	46	47	47	-	-	47	47
			Meningkatnya kinerja DPMPTSP	Nilai SAKIP DPMPTSP	-	-	79,2	79,5	80	80,5	79,27	-	80	80,5
				IKM DPMPTSP	-	-	88	88	89	89	90,03	-	89	89
				Jumlah ASN dpmpstsp yang menjadi agen perubahan	-	-	1	1	2	2	3	-	2	2
				Jumlah inovasi DPMPTSP	-	-	1	1	1	1	1	-	1	1
				Nilai IP ASN	-	-	75	80	85	87	-	-	85	87

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Sinergi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi dengan Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Serta dengan Kementrian dan lembaga di tingkat Pusat.

DPMPTSP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi DPMPTSP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah :

Menuju Jawa tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera, “Mboten Korupsi dan Mboten Ngapusi”.

Misi DPMPTSP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah :

- a. Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten, dengan Tujuan untuk Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Dengan Strategi :
 - Membangun open government melalui upaya perkuatan keterbukaan informasi, transparansi, serta mendorong partisipasi publik, termasuk partisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
 - Membangun sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja.
- b. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal RI tahun 2020-2024, Visi dan Misi BKPM adalah sebagai berikut:

Visi BKPM :

BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”

Misi BKPM :

BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan) sebagai berikut:

- 1) Struktur Ekonomi yang produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
- 2) Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, Efektif, dan Terpercaya.

DPMPTSP Kabupaten Wonogiri mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

Sesuai dengan tugas pokok DPMPTSP Kabupaten Wonogiri yaitu: “Menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah”, keberadaan DPMPTSP mendukung tercapainya misi Bupati Wonogiri yang ke-3 (tiga) yaitu: **“Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran”**.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), menghadapi permasalahan:

- a. Masih terbatasnya inovasi pelayanan penanaman modal;
- b. Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM aparatur pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- c. Belum optimalnya sistem perizinan pendukung sistem OSS-RBA;
- d. Belum optimalnya pengawasan perizinan dan implementasi paket kebijakan yang mendorong pengembangan investasi dalam upaya meningkatkan peringkat *Ease of Doing Business* (EODB);
- e. Belum optimalnya koordinasi dengan Dinas teknis terkait dalam penyelesaian pelayanan dan permasalahan pelaksanaan penanaman modal.

2. Bidang Pengembangan dan Pengendalian, menghadapi permasalahan:

- a. Masih rendahnya kesadaran investor untuk menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM);

- b. Masih terdapat pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal;
- c. Perumus kebijakan yang kurang progresif;
- d. Pengkoordinasian lintas OPD yang kurang optimal;
- e. Belum optimalnya kualitas perencanaan dan penganggaran;
- f. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah;
- g. Masih terdapat regulasi daerah yang belum sinkron dengan peraturan pemerintah pusat;
- h. Belum tersedianya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
- i. Belum cukupnya SDM baik secara kualitas maupun kuantitas.

3. Bidang Promosi dan Pengolahan Data, menghadapi permasalahan :

- a. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam promosi penanaman modal;
- b. Belum optimalnya follow up kepeminatan investasi;
- c. Data yang tersaji di OSS sangat terbatas;
- d. Data di OSS tidak berbasis NIK;
- e. Integrasi antar ada berbasis NIK masih terkendala;
- f. Terbatasnya SDM IT;
- g. Masih kurang updatenya data investasi.

3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

Pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri ke depan mempunyai tantangan yang harus diantisipasi dan peluang yang harus dimanfaatkan. Adapun tantangan dan peluang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tantangan :

- a. Belum semua layanan menggunakan sistem online;
- b. Kebijakan pusat yang selalu berubah dan memerlukan pengkajian dan implementasi kebijakan baru dari daerah;

- c. Masih adanya investor yang terlambat atau belum membuat LKPM;
- d. Masih ada anggapan dan pemberitaan bahwa ijin sulit dan adanya konten negatif lain terkait DPMPTSP;
- e. Belum terpenuhinya kebutuhan SDM sesuai ANJAB dan ABK;
- f. Masih terjadi tarik ulur kewenangan dengan SKPD teknis.

2. Peluang :

- a. Tersedianya dasar hukum yang kuat dari Pemerintah Pusat yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengembangkan akses penanaman modal dan akses perijinan usaha yang ada di daerah dengan seluas-luasnya;
- b. Tersedianya jaringan infrastruktur daerah sehingga masih memungkinkan untuk lebih dikembangkan guna meningkatkan gairah usaha para investor di Kabupaten Wonogiri;
- c. Banyak lahan dan kawasan potensial yang belum dimanfaatkan masyarakat sebagai modal daerah untuk menarik minat investor yang ingin mengembangkan usahanya di Kabupaten Wonogiri;
- d. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat membuka peluang bagi DPMPTSP untuk lebih mengakselerasi, berinovasi dan mengembangkan pelayanan perizinan terpadu agar lebih efisien dan efektif bagi masyarakat dalam mengurus perizinan dan nonperizinan dengan lebih mudah dan cepat;
- e. Produk-produk UMKM Kabupaten Wonogiri mampu bersaing di pasar dalam negeri;
- f. Kabupaten Wonogiri sebagai daerah yang pro investasi dan mempunyai potensi daerah yang melimpah.

D. Penentuan isu-isu strategis

Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan karena dampaknya yang sangat penting bagi perangkat daerah:

1. Adanya kecenderungan menurunnya pertumbuhan investasi;
2. Masih rendahnya legalitas Usaha Mikro dan Kecil;
3. Lemahnya sistem pendataan tentang Jumlah Investor/ Nilai Investasi;
4. Stagnasi Pelayanan Publik Bidang Investasi "*Ease of Doing Business*";
5. Ego sektoral OPD dan sistem perijinan yang berbasis pada OSS dan penataan ruang (RDTR);
6. Dampak COVID 19 terhadap melemahnya pengembangan Investasi;
7. Potensi perubahan regulasi di level nasional, seperti omnibuslaw.

E. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Penyusunan RKPD tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ke 2 dari RPJMD kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026. RKPD yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD 2023 dapat dilihat dalam tabel 2.3.

Tabel. 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
DPMPTSP Kabupaten Wonogiri

No	RANCANGAN AWAL RKPD						ANALISIS HASIL KEBUTUHAN		Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	10	11	12	
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						5.323.748.606		3.727.668.895	
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DPMPTSP Kab. Wonogiri	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100%	4.670.120.660	100%	3.445.668.895		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP Kab. Wonogiri	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	108.499.206	100%	22.000.000		
	1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSP Kab. Wonogiri	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.519.478	2 Dokumen	20.000.000	
	1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPTSP Kab. Wonogiri	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.999.728	1 Laporan	1.000.000	

	1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP Kab. Wonogiri	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	99.980.000	4 Laporan	1.000.000	
2		Aministrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMPTSP Kab. Wonogiri	Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun	100%	3.907.130.742		3.035.211.385	
	2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP Kab. Wonogiri	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bu 1	3.905.131.078	27 Orang/bu 1	3.033.212.385	
	2.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DPMPTSP Kab. Wonogiri	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	300.000	12 Dokumen	999.000	
	2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMPTSP Kab. Wonogiri	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.399.664	1 Laporan	1.000.000	
	2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	DPMPTSP Kab. Wonogiri	Jumlah dokumen laporan bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 laporan	300.000	-	-	
3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPMPTSP Kab. Wonogiri	Persentase tertib administrasi kepegawaian	100%	40.000.000	100%	10.000.000	
	3.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMPTSP Kab. Wonogiri	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	40.000.000	2 Orang	10.000.000	

	4	Administrasi Umum Perangkat daerah		DPMPTSP Kab. Wonogiri	Persentase fasilitas administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	124.490.712	100%	97.457.510	
		4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMPTSP Kab. Wonogiri	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.500.000	1 Paket	1.000.000	
		4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP Kab. Wonogiri	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	29.990.712	2 Paket	24.458.630	
		4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMPTSP Kab. Wonogiri	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.000.000	
		4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMPTSP Kab. Wonogiri	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	1 Paket	10.000.000	
		4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPMPTSP Kab. Wonogiri	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.000.000	1 Paket	6.998.880	
		4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP Kab. Wonogiri	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	40.000.000	
	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		DPMPTSP Kab. Wonogiri	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	100%	168.500.000	100%	10.000.000	
		5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMPTSP Kab. Wonogiri	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional/lapangan disediakan	1 Unit	32.500.000	1 Unit	0	
		5.2	Pengadaan Mebel	DPMPTSP Kab. Wonogiri	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	66.000.000	1 Unit	5.000.000	

		5.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP Kab. Wonogiri	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	70.000.000	1 Unit	5.000.000	
6	.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP Kab. Wonogiri	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	176.500.000	100%	176.000.000	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP Kab. Wonogiri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.500.000	1 Laporan	1.000.000	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTSP Kab. Wonogiri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	75.000.000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPTSP Kab. Wonogiri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	
7	.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP Kab. Wonogiri	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	145.000.000	100%	95.000.000	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMPTSP Kab. Wonogiri	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	70.000.000	10 Unit	65.000.000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMPTSP Kab. Wonogiri	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	50.000.000	2 Unit	20.000.000	

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP Kab. Wonogiri	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	25.000.000	20 Unit	10.000.000	
B.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODA			DPMPTSP Kab. Wonogiri	Jumlah Investor skala mikro dan kecil	800 investor skala mikro dan kecil	74.999.164	800 investor skala mikro dan kecil	100.000.000	
	1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		DPMPTSP Kab. Wonogiri	jumlah investor skala mikro dan kecil terfasilitasi NIB (Nomer Induk Berusaha)	800 IUMK	74.999.164	800 IUMK	100.000.000	
		1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Wonogiri	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 dokumen	74.999.164	1 dokumen	100.000.000	
C.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			DPMPTSP Kab. Wonogiri	Presentase Realisasi perizinan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur)	87%	104.998.840	87%	36.000.000	
	1.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		DPMPTSP Kab. Wonogiri	Jumlah permohonan izin yang ditindaklanjuti sesuai SOP (Standar Operasioanl Prosedur)	1127 Pelaku Usaha	104.998.840	1127 Pelaku Usaha	36.000.000	

	1.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kot	DPMPTSP Kab. Wonogiri	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1000 izin	54.999.456	1000 izin	33.000.000	
	1.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	DPMPTSP Kab. Wonogiri	jumlah dokumen permohonan pemenuhan komitmen yang dinotifikasi	27 dokumen	29.999.384	-	-	
	1.3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	DPMPTSP Kab. Wonogiri	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	100 orang	20.000.000	100 orang	3.000.000	
D.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		DPMPTSP Kab. Wonogiri	Jumlah investor yang merealisasikan penanaman modalnya	1050 Investor	437.631.605	1050 Investor	60.000.000	
	1.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Wonogiri	Jumlah Investor yang tertib LKPM	110 investor	437.631.605	110 investor	60.000.000	
	1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP Kab. Wonogiri	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	50 Kegiatan Usaha.	92.463.360	50 Kegiatan Usaha.	20.000.000	

	1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP Kab. Wonogiri	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	175 Pelaku Usaha	275.081.325	175 Pelaku Usaha	20.000.000	
	1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP Kab. Wonogiri	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	75 Kegiatan Usaha	70.086.920	75 Kegiatan Usaha	20.000.000	
E.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		DPMPTSP Kab. Wonogiri	Presentase data penanaman modal yang di update	100%	35.998.337	100%	86.000.000	
	1.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Wonogiri	Jumlah jenis data penanaman modal yang diupdate (jumlah investor, nilai investasi, dan penyerapan tenaga kerja)	3 Jenis	35.998.337	3 Jenis	86.000.000	
	1.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Wonogiri	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 dokumen	35.998.337	4 dokumen	86.000.000	
JUMLAH :						5.323.748.606		3.727.668.895	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai arah kebijakan dari BKPM yang menetapkan dua arah kebijakan, yaitu: pertama adalah peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal, dan kedua adalah peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan pertama adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanaman modal (*investor needs*);
- b. Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing;
- c. Meningkatkan kualitas kerjasama penanaman modal;
- d. Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal;
- e. Meningkatkan kualitas layanan penanaman modal;
- f. Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- g. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik.

Sedangkan strategi yang ditempuh pada arah kebijakan kedua adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong peningkatan penanaman modal di bidang usaha yang banyak menyerap tenaga kerja;
- b. Mendorong peningkatan produktivitas penanaman modal;
- c. Mendorong peningkatan penanaman modal yang melakukan transfer pengetahuan dan teknologi;

- d. Mendorong peningkatan daya saing dan akses pasar;
- e. Mendorong peningkatan penanaman modal pada industri yang berorientasi ekspor dan industri substitusi impor;
- f. Mendorong peningkatan penanaman modal yang berwawasan lingkungan dan memiliki dampak sosial yang besar;
- g. Mendorong peningkatan optimalisasi penggunaan sumber daya alam dan hasil produksi dalam negeri.

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu hingga lima tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada Visi dan Misi yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada isu-isu strategis dan berkembang dalam pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi organisasi, yang mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Selanjutnya sesuai dengan visi dan misi, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri, yaitu Mewujudkan iklim investasi yang sehat.

Tujuan strategis diatas selanjutnya dijabarkan ke dalam beberapa sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Tahun 2023 merupakan periode kedua dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026. Sesuai dengan Rencana Strategis yang telah disusun, terdapat 2 (dua) Tujuan dengan 2 (dua) sasaran dan 10 (sepuluh) indikator kinerja sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1.**Tujuan dan Sasaran DPMPTSP TAHUN 2023**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan DPMPTSP yang baik		Nilai kematangan organisasi DPMPTSP	46
		Meningkatnya kinerja penunjang urusan penanaman modal	Nilai SAKIP DPMPTSP	79,20
			Jumlah ASN DPMPTSP yang menjadi agen perubahan	1
			Jumlah Inovasi DPMPTSP	1
			IKM DPMPTSP	88,00
			Nilai IP ASN	75,00
2	Meningkatkan Nilai Investasi		Kenaikkan Nilai Investasi	50,00%
		Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	3000 investor
			Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA (dalam milyar rupiah)	600 milyar

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2023
			Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	2 tenaga kerja/investor

3.2 Program dan Kegiatan.

Dalam upaya mencapai target kinerja tujuan dan sasaran yang ditetapkan, dalam periode tahun 2021-2026 ditetapkan sebanyak 6 (enam) Program baik Program Urusan maupun Program Penunjang Urusan, yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penetapan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ini disertai dengan pagu indikatif pendanaannya beserta rencana target yang akan dicapai pada periode 2021-2026, yang berpedoman pada proyeksi kerangka pendanaan yang ditetapkan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026. Rencana program yang akan dilaksanakan dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
3. Program Promosi Penanaman Modal;
4. Program Pelayanan Penanaman Modal;
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Administrasi kepegawaian perangkat daerah;
8. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota;
10. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota;
11. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota;
12. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Tahun 2023 merupakan tahun kedua periode RPJMD tahun 2021-2026, dimana pada tahun ini DPMPTSP harus menjalankan tugas utamanya untuk menaikkan nilai investasi. Rumusan rencana Program dan Kegiatan DPMPTSP Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 pada tabel 3.2.

Tabel 3.2.

Program dan Kegiatan DPMPSTSP Kabupaten Wonogiri beserta pagu indikatif tahun 2023

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					C a t a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiat an				Tolok Ukur	Target	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								3.727.668.895			5.257.026.188		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3.445.668.895			4.638.397.626		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								22.000.000			108.499.206		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintah n daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	100 %	20.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentas e tertib laporan kinerja administrasi pemerinta han daerah	100 Persen	5.519.478	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintah n daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	100 %	1.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentas e tertib laporan kinerja administrasi pemerinta	100 Persen	2.999.728	

		Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	daerah yang disusun							han daerah		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Laporan	100 %	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 Persen	99.980.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3.035.211.385				3.965.407.708
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	27 Orang/bulan	100 %	3.033.212.385	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 Persen	3.963.708.044
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Dokumen	100 %	999.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 Persen	300.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase tertib laporan kinerja administrasi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	100 %	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tertib laporan kinerja administrasi	100 Persen	1.399.664

	pemerintahan daerah	Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									pemerintahan daerah		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									10.000.000			40.000.000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase tertib administrasi kepegawaian	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Orang	100 %	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 Persen	40.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah									97.457.510			124.490.712	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Paket	100 %	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 Persen	1.500.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Paket	100 %	24.458.630	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 Persen	29.990.712	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Paket	100 %	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan	100 Persen	15.000.000	

										han daerah			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Paket	100 %	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 Persen	20.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Paket	100 %	6.998.880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 Persen	8.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 %	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 Persen	50.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								10.000.000				53.500.000	
Pengadaan Mebel	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Unit	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 Persen	22.000.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Unit	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 Persen	31.500.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								176.000.000				176.500.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	100 %	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 Persen	1.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 %	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 Persen	75.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 %	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 Persen	100.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								95.000.000				170.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Persentase tertib laporan kinerja administrasi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	10 Unit	100 %	65.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tertib laporan kinerja administrasi	100 Persen	70.000.000

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pemerintahan daerah	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya									pemerintahan daerah		
Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Unit	100 %	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 Persen	75.000.000
Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	20 Unit	100 %	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 Persen	25.000.000
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL								100.000.000				74.999.164	
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								100.000.000				74.999.164	
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor skala mikro dan kecil	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	jumlah investor skala mikro dan kecil terfasilitasi NIB (Nomer Induk Berusaha)	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	800 investor skala mikro dan kecil	1 Dokumen	800 investor	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Investor skala mikro dan kecil	800 investor skala mikro dan kecil	74.999.164
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL								36.000.000				69.999.456	
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota								36.000.000				69.999.456	
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan	Presentase Realisasi perizinan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur)	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan	Jumlah permohonan izin yang ditindaklanjuti sesuai SOP (Standar	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1000 Pelaku Usaha	1127 izin	33.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Realisasi perizinan sesuai SOP (Standar	87 %	49.999.456

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Operasioanl Prosedur)							Operasion al Prosedur)		
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Presentase Realisasi perizinan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur)	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah permohonan izin yang ditindaklanjuti sesuai SOP (Standar Operasioanl Prosedur)	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	100 Orang	1127 izin	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentas e Realisasi perizinan sesuai SOP (Standar Operasion al Prosedur)	87 %	20.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL								60.000.000				437.631.605
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								60.000.000				437.631.605
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah investor yang merealisasikan penanaman modalnya	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah investor yang tertib LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1100 investor	50 Kegiatan Usaha.	110 investor	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Fasilitas i Penana man Modal	Jumlah investor yang merealisa sikan penanam an modalnya	1100 investor	92.463.360

Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah investor yang merealisasikan penanaman modalnya	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah investor yang tertib LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1100 investor	175 Pelaku Usaha	110 investor	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	Jumlah investor yang merealisasikan penanaman modalnya	1100 investor	275.081.325	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah investor yang merealisasikan penanaman modalnya	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Jumlah investor yang tertib LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1100 investor	75 Kegiatan Usaha	110 investor	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	Jumlah investor yang merealisasikan penanaman modalnya	1100 investor	70.086.920	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL								86.000.000				35.998.337	
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								86.000.000					35.998.337
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	Presentase data penanaman modal yang di update	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara	Jumlah jenis data penanaman modal yang diupdate (jumlah investor, nilai investasi, dan penyerapan tenaga kerja)	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	3 jenis	86.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase data penanaman modal yang di update	100 %	35.998.337	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditentukan dalam cascading DPMPTSP Kabupaten Wonogiri untuk pencapaian tujuan Tahun 2021-2026, dilakukan penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

4.1. Program dan Kegiatan

Rumusan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka rencana program yang akan dilaksanakan dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
3. Program Promosi Penanaman Modal;
4. Program Pelayanan Penanaman Modal;
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Pelaksanaan tugas dan fungsi, DPMPTSP Wonogiri pada tahun 2023 didukung dengan 6 program utama dengan rencana sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah persentase tertib pelaporan kinerja administrasi Pemerintahan Daerah dengan target kinerjanya 100%. Indikator ini digunakan untuk mengukur kelancaran tugas pelaporan kinerja administrasi Pemerintahan Daerah dalam satu tahun.

Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, diimplementasikan melalui 6 kegiatan, sebagai berikut :

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Di tahun 2023, kegiatan ini didukung dengan 3 sub kegiatan yaitu “Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah” yang difokuskan untuk penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan outputnya adalah 2 dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja dan LKjIP) dengan target yaitu 100%. “Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD” dengan outputnya 1 Laporan dengan target 100%. “Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah” dengan outputnya 4 laporan dengan target 100%.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 3 sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
- 2) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD; dan
- 3) Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD.

Selain terpenuhinya penyediaan gaji dan tunjangan ASN, output dari kegiatan ini adalah 14 laporan keuangan 13 laporan dengan target kegiatan ini adalah 100%.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu “Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan”. Output dari kegiatan ini adalah 2 orang dapat mengikuti bimtek atau diklat. Target atas kegiatan ini adalah 100%.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 6 sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- 2) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- 3) Penyediaan peralatan rumah tangga;

- 4) Penyediaan bahan logistik kantor;
- 5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- 6) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

Kegiatan ini difokuskan untuk penyediaan terhadap kebutuhan administrasi umum pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri. Output dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan administrasi umum kantor seperti yang telah diuraikan ke dalam beberapa sub kegiatan di atas. Target atas kegiatan ini adalah 100%.

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 3 sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat;
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; dan
- 3) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

Output dari kegiatan ini adalah terpenuhinya jasa penunjang urusan kantor seperti materai (surat menyurat) dan terbayarnya jasa penggunaan internet, air dan listrik dan yang lainnya seperti yang diuraikan ke dalam sub kegiatan di atas. Target atas kegiatan ini adalah 100%.

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah

Kegiatan ini didukung oleh 2 sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengadaan Mebel;
- 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Kegiatan ini difokuskan untuk pemeliharaan terhadap barang milik daerah seperti gedung dan sarana prasarana pendukungnya, serta pemeliharaan terhadap mebel yang terdapat di kantor DPMPTSP Kabupaten Wonogiri. Output dari kegiatan ini adalah terpenuhinya jasa pemeliharaan terhadap BMD (kendaraan dinas, gedung dan mebel). Target atas kegiatan ini adalah 100%.

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Indikator kinerja Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah jumlah kebijakan daerah tentang penanaman modal dengan target kinerjanya 0 pada tahun 2023.

3. Program Promosi Penanaman Modal

Indikator kinerja Program Promosi Penanaman Modal adalah jumlah investor skala mikro dan kecil dengan target kinerjanya 800 investor skala mikro dan kecil. Indikator ini digunakan untuk mengukur pertumbuhan investor dalam satu tahun. Program ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu “Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota dengan outputnya 1 dokumen”.

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

Indikator kinerja Program Pelayanan Penanaman Modal adalah presentase realisasi perizinan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) dengan target kinerjanya 87%. Indikator ini digunakan untuk mengukur indeks kemudahan berusaha dan pelayanan prima di Kabupaten/Kota. Program ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu “Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan outputnya yaitu 1000 pelaku usaha. “Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan dengan outputnya 100 orang”.

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Modal

Indikator kinerja Program Pengendalian Penanaman Modal adalah jumlah investor yang merealisasikan penanaman modalnya dengan target kinerjanya 1100 investor. Indikator ini digunakan untuk mengukur pertumbuhan nilai investasi dalam satu tahun.

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Indikator kinerja Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal adalah presentase data penanaman modal yang diupdate dengan target kinerjanya 100%. Indikator ini digunakan untuk mengukur tersedianya database terkait data penanaman modal di kabupaten/kota. Program ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu “Pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan outputnya 4 dokumen”.

BAB V

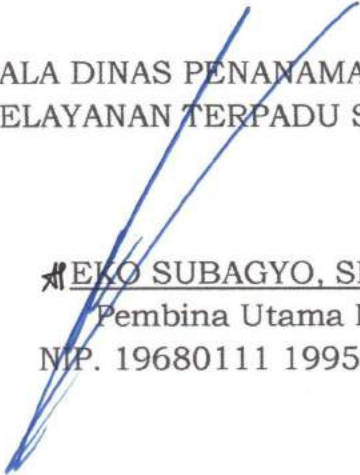
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) DPMPTSP Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra DPMPTSP periode 2021 – 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati Wonogiri serta target dan sasaran pembangunan.

Melalui penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) DPMPTSP Kabupaten Wonogiri Tahun 2023, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi dinas diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Wonogiri maupun dengan perangkat daerah lingkup luar yang membidangi fungsi tertentu.

Demikian penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) DPMPTSP Kabupaten Wonogiri Tahun 2023, kami mohon masukan, saran dan koreksi.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,


EKO SUBAGYO, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680111 199503 1 002